

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN 50 KOTA

(Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Dan Kecamatan Kapur IX)

Oleh :

Putri Aulia

Pembimbing : Restu Agusti dan Julita

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : auliaputrye30@gmail.com

The Effect of Competence of Village Fund Management Officers, Commitment of Village Government Organization, Utilization of Information Technology and Community Participation of the Accountability of Village Fund Management in Kabupaten 50 Kota

(Empirical Study On Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, and Kecamatan Kapur IX)

ABSTRACT

The accountability of village fund management has become a demand for local government. The existence of this demand results from the implementation of Law No. 6 of 2014 on the Village. The management of village funds in City 50 Regency is still far from the expectations. Problems emerging from the accountability of village fund management are related to the competence of village fund management officers, the commitment of village government organizations, utilization of information technology and community participation. This research aims to know and analyze the influence of competence of village fund management officer, commitment of village government organization, utilization of information technology and public participation to accountability of village fund management in City 50 Regency. This is a quantitative research study and data were collected by surveys or questionnaires. Population and sample are village fund management officers in City 50 Regency with 96 respondents. The hypothesis was tested by multiple linear regression analysis with SPSS application. The findings show that: (1). The competence of village fund management officers has a positive and significant impact on the accountability of village fund management; (2). The commitment of village government organizations has a positive and significant impact on the accountability of village fund management; (3). utilization of information technology has a positive and significant impact on the accountability of village fund management; (4) Community participation has a positive and significant impact on the accountability of village fund management. The coefficient of determination 0,866. This shows that the influence of independent variables namely: the

competence of the village fund management officer, the commitment of the village government organization, utilization of information technology and the participation of the society, towards the dependent variable (the accountability of village fund management) explained by the equation model in this research is 86,6%. While the rest 13,4% is explained by other factors which are not included in this model. The implications of this study are to encourage the accountability of village fund management through the increased competence of village fund management officers, village government organizational commitment, and community participation.

Keywords : Competence of village fund management officers, Commitment of village government organization, Utilization of information technology, Community participation, accountability of village fund management.

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada daerah. Desentralisasi terdiri dari berbagai aspek yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat (Nadir, 2013). Hal ini disebabkan adanya desentralisasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat ditingkat bawah dapat dilaksanakan. Di Indonesia, salah satu bentuk desentralisasi yang sedang dilaksanakan adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan

dimulai dari tingkat desa. Ini jelas terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Berdasarkan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2015, terdapat keterlambatan dan rendahnya penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa. Dalam hal penggunaan dana desa, masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga, hasil pengadaan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan kelebihan perhitungan volume RAB (Kementerian Keuangan RI, 2016:19). Hasil evaluasi penggunaan dana desa semester satu tahun 2016 masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/ penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyeteroran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran diluar APBDesa

(Kementerian Keuangan RI, 2016:19).

Dalam rapat koordinasi yang diadakan di aula kantor bupati setempat. Wakil Bupati Limapuluh Kota dalam penyampaiannya menyorot pertanggungjawaban dana nagari tahun 2015 yang masih ada sebanyak 27 nagari yang belum memasukan laporannya (www.padang-today.com).

Sementara itu berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bahwa di Kabupaten Limapuluh Kota belum secara aktif menggunakan Siskeudes sebagai sarana pertanggungjawaban sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (www.bpkp.go.id).

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Ferina, 2016).

Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan. (Mada, Kalangi, Gamaliel, 2017).

Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Rahmanurrajjid (2008:6) dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) yang meneliti desa di Kabupaten Gorontalo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen, waktu serta lokasi penelitian. Penelitian ini menambahkan satu variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diambil dari penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
- 2) Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh

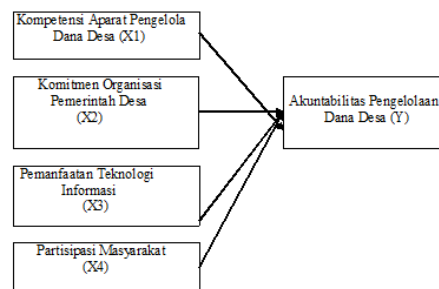
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

- 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

- 4) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya

kompetensi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut, diantaranya yaitu kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₁ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukian et.al (2010:408) dalam Mada, Kalangi, dan Gamaliel, bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49) dalam Mada, Kalangi, dan Gamaliel, bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat

terhadap sistem akuntabilitas. Perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas pada sebuah organisasi melalui komitmen yang bagus untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₂ : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang

baik. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Crook dan Sverrisson dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) menyatakan akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan. Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Zeyn (2011) dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel menyatakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Rahmanurrasjid (2008:6) dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₄ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah aparat desa yang ada di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX, yang terdiri dari : Kepala desa, Sekretaris, Bendahara, dan Unsur Kaur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Strata sampling adalah desa daerah aliran sungai, desa dataran rendah, dan desa dataran tinggi/pegunungan. Total sampel dalam penelitian ini adalah 96 aparat pengelola dana desa.

**Tabel 1
Konstruk dan Indikator Variabel**

Konstruk	Indikator
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X1)	- Pengetahuan - Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan - Keahlian teknis - Kemampuan mencari solusi - Inisiatif dalam bekerja - Keramahan dan kesopanan
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2)	- Keyakinan terhadap tujuan organisasi - Perasaan memiliki organisasi - Mempertahankan keanggotaan organisasi - Kesetiaan dalam organisasi - Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi
Pemanfaatan Teknologi	- Intensitas pemanfaatan - Frekuensi pemanfaatan

Informasi (X3)	- Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan
Partisipasi Masyarakat (X4)	- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa - Terlibat dalam rapat paripurna - Mengusulkan rencana anggaran - Terlibat mengawasi dan melaporkan - Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran - Memberikan penghargaan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	- Kejujuran dan keterbukaan informasi - Kepatuhan dalam pelaporan - Kesesuaian prosedur - Kecukupan informasi - Ketepatan penyampaian laporan

Teknik analisis data menggunakan uji asumsi normalitas dan uji asumsi klasik multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yaitu uji statistik t. Model analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1 = Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Partisipasi Masyarakat

A = konstanta

β = koefisien arah regresi

e = error

Hasil Penelitian dan Pembahasan Uji Statistik Deskriptif.

Tabel 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	85	23	45	34,46	4,631
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	85	18	45	34,88	4,473

Pemanfaatan Teknologi Informasi	85	22	45	35,46	5,712
Partisipasi Masyarakat	85	20	50	39,52	5,168
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	85	29	50	39,07	4,540
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data Olahan, 2018

Uji Normalitas.

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,715 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,686. Nilai signifikansi ini lebih besar dari α 0,05 (0,686 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam variabel penelitian ini terdistribusi secara normal. Dengan demikian data dalam variabel ini baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,62053625
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		,715
Asymp. Sig. (2-tailed)		,686

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2018

Uji multikolinieritas.

Nilai VIF dari semua variabel independen berada antara 1-10. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi korelasi yang kuat. Ini berarti bahwa tidak terdapat masalah kemiripan antar variabel independen atau tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model regresi yang diteliti.

Tabel 4

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	,265	3,781

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	,255	3,926
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,586	1,707
Partisipasi Masyarakat	,203	4,927

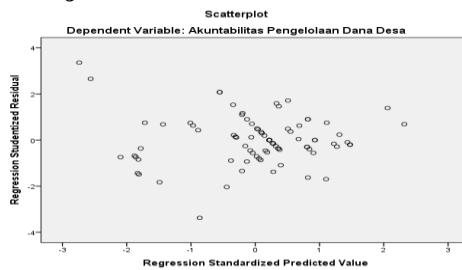
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Olahan, 2018

Uji heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Analisis Regresi Berganda. Hasil pengujian regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,405 + 0,288 \text{ Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa} + 0,258 \text{ Komitmen Organisasi Pemerintah Desa} + 0,084 \text{ Pemanfaatan Teknologi Informasi} + 0,323 \text{ Partisipasi Masyarakat} + e$$

Ringkasan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,405	1,503		2,931	,004
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	,288	,076	,294	3,792	,000
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	,258	,080	,254	3,212	,002
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,084	,041	,105	2,016	,047
Partisipasi Masyarakat	,323	,078	,368	4,153	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Olahan, 2018

Koefisien Determinasi (R²).

Nilai R square sebesar 0,866. Hal ini berarti bahwa variabel independen yakni kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat menjelaskan 86,6% variabel dependen yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sisanya sebesar 13,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian Hipotesis pertama (H1) yakni pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,792 > 1,99$ dan $sig\ 0,00 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh

seseorang dalam hal aparatur pemerintah khususnya pemerintah desa, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan Ariesta (2013).

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Ferina, 2016). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto dan Yudianto (2017) yang menemukan kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) yakni pengaruh

komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,212 > 1,99$ dan $sig\ 0,02 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Konsep akuntabilitas yang dikembangkan oleh Cavoukian et al dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel (2010:409) mengemukakan terdapat elemen penting dari akuntabilitas diantaranya: (1) Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan penerapan kebijakan internal yang konsisten dengan kriteria eksternal. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan. (Mada, Kalangi, Gamaliel, 2017).

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) yang menemukan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) yakni pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,016 > 1,99$ dan $sig\ 0,047 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban keuangan desa pun akan semakin bagus.

Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H4) yakni pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,153 > 1,99$ dan $sig\ 0,000 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Semua model akuntabilitas adalah bersifat hubungan, pada dasarnya terdapat aktor (pemerintah) dan konstituen (masyarakat). Agar pemerintah tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat seharusnya datang meminta pertanggungjawaban pemerintah, sehingga pelaksanaan desentralisasi akan lebih akuntabel. Crook dan Sverrisson dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) menyatakan akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin.

Rahmanurrasjid (2008:6) dalam Mada, Kalangi dan Gamaliel mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, bahwa semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.
- 2) Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Artinya semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

4) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti penerapan system pengendalian instansi pemerintah (SPIP), dll.
2. Bagi aparat pemerintah desa. Penelitian ini setidaknya sedikit menggambarkan mengenai kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap

- akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa yang ada di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat membenahi baik dari kompetensi, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat pada aparat desa yang ada di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota agar akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih baik.
3. Bagi masyarakat. Masyarakat sebagai agen dapat melihat dan menilai mengenai pertanggungjawaban atas dana anggaran yang telah mereka berikan kepercayaan kepada pemerintah desa Kabupaten 50 Kota.
 4. Bagi institusi. Semua pengaruh hipotesis dalam penelitian ini bias menjadi masukan khususnya bagi pemerintah desa Kabupaten 50 Kota agar lebih memperhatikan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat agar dalam hal proses pengelolaan dana desa bias berjalan dengan baik. Selain itu, juga dapat meningkatkan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Agrawal, Arun., dan Ribot, Jesse C. 1999. *Accountability in Decentralization A Framework With South Asian and West African Cases*. The Journal of Developing Areas. Vol.33, Page 473-502.
- Akib, Mulyati., Nurnaluri, Sitti dan Sutrawati Kadek. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.
- Bicu, YS. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cipta Harta Prima.
- Benham, Michael., dan MacLean, Tommy L. 2011. *Where Is The Accountability in International Accounting Standards? : A Decoupling Perspective*. Business Ethics Quarterly. Vol.21 No.1, page 47-72.
- Cavoukian, Ann., Taylor, Scott., dan Abrams, Martia E. 2010. *Privacy by Design : Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices*. Vol.3, Page 405-413.
- Cullen, J. F., Parboteeah, K. P., dan Victor, B. 2003. *The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment. A Two Study Analysis*. Journal of Business Ethics, Vol.46, No.2. Page 127-141.
- Curtis, Susan, and Dennis Wright. 2001. *Retaining Employees –*

- The Fast Track to Commitment, Management Research News*. Volume 24.
- Cut Zurnali. 2010. *Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation : Knowledge Worker – Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia pada Masa Depan*. Penerbit Unpad Press. Bandung.
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. *Local Government Decision Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda*. Public Administration and Development. Vol.23, Page 307-306.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006 dalam Indriasari. 2008.
- Francis, Paul., dan James, Robert. 2003. *Balancing Rural Poverty Reduction and Citizen Participation: The Contradictions of Uganda's Decentralization Program*. World Development. Vol.31, No.2, page 325-337
- Husna,Saifatul., dan Abdullah, Syukriy. 2016. *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten*
- Pidie)*. Universitas Syiah Kuala.
- Ivan,Yudianto.,dan Ekasari, Sugiarti. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)*. Universitas Padjadjaran.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Redtop Hotel and Convention Center. 21-24 November 2016.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2009. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000.

- Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.
- Mada, Sarifudin., Kalangi, Lintje dan Gamaliel Hendrik. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mikkelsen 1999 dalam Kartika Septianis Ray. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Politik Profetik. Vol.1, No.1. Hal.1-21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Schlippe dalam Kartika Septianis Ray. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- S.G.A. Smeenk, R.N. Eisinga, J.C. Teelken and J.A.C.M. Doorewaard. 2006. *The effects of HRM practices and antecedents on organizational commitment among university employees*. International Journal. Of Human Resource Management 17.
- Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sugiarti *et.al.* 2017. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Bandung.
- Sugiarti, Ekasari., dan Ivan, Yudianto. 2017. *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan*

- Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang).* Universitas Padjajaran.
- Sululing. S. 2017. *Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa.* Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 02, Juli 2017: 311-326.
- Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan : Teori dan Implementasi.* Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sululing, Siswadi. 2017. *Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa.* Jurnal Ekonomi.
- UlumBahrul. 2012. | Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Widyatama, Arif.,Novita,Lola dan Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).* STIE Panca Bhakti Palu.
- Wilson, John dan Hinton Peter. 1993. *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management.* Great Britain: Tudor Business Publishing Ltd.
- www.padang-today.go.id
- www.bpkp.go.id